

Membongkar Epistemologi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Konteks Postmodernisme

Rizki Ramadan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: 190303072@student.ar-raniry.ac.id

Article history: Received: 30 July 2025; Revised: 06 Agustus 2025;
Accepted: 12 Agustus 2025; Published: 17 Agustus 2025

Abstract

This study deconstructs the educational epistemology of Ki Hadjar Dewantara (KHD) through the lens of postmodern critique. Using a deconstructive approach, the research investigates the relevance and reinterpretation of KHD's concepts of the "Tri-Center of Education" (family, school, society) and the among system within the context of postmodern epistemological relativism. The primary texts of KHD are analyzed alongside the theoretical frameworks of postmodern thinkers such as Jean-François Lyotard, Michel Foucault, and Jacques Derrida. The findings reveal both intersections and tensions between KHD's humanistic vision of education and the postmodern skepticism toward grand educational narratives. On one hand, KHD's educational philosophy resonates with postmodernism in its resistance to knowledge homogenization and singular authority. On the other hand, a critical gap exists between KHD's ethical-spiritual orientation and the radical relativism of postmodernism, which often leans toward nihilism. Therefore, this study emphasizes the need to critically reconceptualize KHD's educational values to remain relevant and transformative amid the fluid, plural, and uncertain conditions of contemporary education. This research contributes to the enrichment of locally grounded critical pedagogy that is culturally rooted yet responsive to global epistemic shifts.

Keywords

Ki Hadjar Dewantara, Postmodernism, Among System, Educational Epistemology

Abstrak

Penelitian ini membongkar epistemologi pendidikan Ki Hadjar Dewantara (KHD) melalui pendekatan dekonstruktif dengan bingkai kritik postmodern. Fokus utama tertuju pada relevansi dan rekontekstualisasi konsep *Tri Pusat Pendidikan* (keluarga, sekolah, masyarakat) serta sistem *among* dalam menghadapi tantangan relativisme pengetahuan yang mencirikan era postmodern. Kajian ini menelaah teks-teks utama KHD dan mengadopsi kerangka teoretis dari pemikir postmodern seperti Jean-François Lyotard, Michel Foucault, dan Jacques Derrida. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran KHD, meskipun lahir dari konteks kolonial dan nasionalisme kebudayaan, menyimpan potensi resistensi terhadap fragmentasi epistemik dan krisis otoritas yang diangkat oleh para pemikir postmodern. Di satu sisi, humanisme pendidikan KHD bertemu dengan semangat postmodern dalam menolak homogenisasi pengetahuan dan dominasi otoritas tunggal. Namun, di sisi lain, terdapat ketegangan antara orientasi etik-spiritual KHD dan relativisme radikal postmodern yang cenderung nihilistik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi rekontekstualisasi nilai-nilai pendidikan KHD secara kritis, agar tetap relevan dan transformatif dalam merespons tantangan pendidikan kontemporer yang bersifat cair, plural, dan penuh ketidakpastian. Kajian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah pedagogi kritis berbasis lokal yang berpijak pada warisan kultural namun terbuka terhadap dinamika zaman.

Kata Kunci

Ki Hadjar Dewantara, Postmodernisme, Sistem Among, Epistemologi Pendidikan

Pendahuluan

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD) kembali mendapatkan perhatian serius dalam diskursus pendidikan nasional, terutama dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum ini, semangat (*merdeka belajar*) dianggap sebagai artikulasi modern dari filosofi pendidikan KHD yang menekankan kemandirian, penghargaan atas kodrat anak, serta peran pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Namun, di tengah dominasi wacana global

postmodernisme yang mengkritisi universalitas, stabilitas makna, dan otoritas epistemik, warisan pemikiran KHD justru menghadapi tantangan baru. Postmodernisme menggugat landasan-landasan besar pendidikan tradisional dan menawarkan pembacaan ulang terhadap makna pengetahuan, identitas, dan otoritas dalam pendidikan. Dalam konteks ini, epistemologi KHD perlu dikaji ulang untuk memahami daya tahan serta keterbukaannya terhadap kritik dan rekonstruksi (Hidayat, 2021).

KHD meletakkan dasar pendidikan pada penghargaan terhadap kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pandangan ini mengandaikan adanya suatu esensi atau hakikat yang melekat dalam diri anak, yang harus dikenali dan difasilitasi melalui proses pendidikan. Dalam kerangka modernisme, ide ini sejalan dengan asumsi bahwa manusia memiliki inti kebenaran yang dapat diketahui dan dikembangkan. Namun, postmodernisme menolak premis semacam itu. Dalam pandangan postmodern, identitas bukan sesuatu yang tetap, melainkan terkonstruksi secara sosial melalui praktik diskursif. Karenanya, konsep kodrat yang esensial dalam pemikiran KHD berhadapan langsung dengan konstruksionisme sosial postmodern yang menekankan relativitas, kontingensi, dan pluralitas makna (Rasidi, 2020).

Lebih lanjut, postmodernisme menggugat gagasan tentang "kebenaran" tunggal yang mendasari praktik pendidikan. Bagi Lyotard, pendidikan modern terlalu berorientasi pada metanarasi, termasuk narasi kemajuan dan rasionalitas, yang pada akhirnya membentuk sistem pengetahuan yang eksklusif dan hegemonik. Jika demikian, maka pemikiran KHD yang menekankan pentingnya penguasaan ilmu dan kebudayaan sebagai alat kemerdekaan dapat dibaca sebagai bagian dari metanarasi modernisme itu sendiri. Namun, di sisi lain, penekanan KHD pada kontekstualitas pendidikan dan pengakuan atas keunikan individu juga dapat dilihat sebagai jembatan menuju pemikiran postmodern, yang mengedepankan lokalitas, diferensiasi, dan otonomi makna (Syam, 2023).

Konsep (kemandirian belajar) dalam pandangan KHD pun perlu dikritisi dalam terang postmodernisme. Kemandirian dalam kerangka KHD merupakan proses memandirikan manusia agar ia mampu berpikir dan bertindak secara bebas sesuai dengan kodratnya. Namun

dalam pandangan postmodern, subjek yang mandiri tidak lagi dipandang sebagai entitas utuh dan rasional, melainkan sebagai hasil konstruksi yang terfragmentasi. Maka, jika kemandirian dianggap sebagai tujuan pendidikan, maka perlu ditanya: mandiri dalam kerangka siapa? Dalam struktur kekuasaan mana proses pendidikan itu berlangsung? Ini membuka diskusi tentang bagaimana pendidikan dapat tetap membebaskan tanpa menciptakan struktur dominasi baru yang tersembunyi (Rohman, 2022).

Meskipun demikian, pemikiran KHD memiliki beberapa kekuatan yang justru sejalan dengan semangat postmodernisme. Misalnya, gagasan bahwa guru adalah *pamong* yang membimbing tanpa memaksakan, mencerminkan semangat pedagogi dialogis dan anti-otoritarian yang dikedepankan oleh para pemikir postmodern. Dalam hal ini, pendidikan bukan menjadi alat negara atau kekuasaan, melainkan ruang otonom di mana subjektivitas dan keberagaman peserta didik diakui dan dirayakan. Dengan demikian, warisan KHD masih relevan, meskipun membutuhkan pembacaan ulang agar tidak jatuh ke dalam esensialisme yang kaku (Munir, 2021).

Ketegangan lainnya muncul pada aspek humanisme pendidikan KHD. Pemikiran KHD sangat dipengaruhi oleh humanisme Barat dan kepercayaan pada potensi luhur manusia. Namun, postmodernisme justru mengkritik humanisme karena mengasumsikan subjek sebagai pusat dan sumber makna. Dalam kritik Foucault dan Derrida, subjek tidaklah tunggal dan stabil, melainkan selalu berada dalam jejaring wacana dan kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya perlu disikapi secara kritis: manusia seperti apa yang hendak dibentuk, dan atas dasar siapa definisinya? Ini menunjukkan bahwa ada jarak epistemologis antara fondasi humanistik KHD dengan kecenderungan anti-humanistik postmodern (Nugraha, 2020).

Namun, ketegangan ini tidak perlu dimaknai sebagai penolakan total terhadap KHD. Sebaliknya, justru membuka ruang untuk melakukan dekonstruksi terhadap konsep-konsep pendidikan yang dianggap sakral. Dalam konteks pendidikan Indonesia yang plural dan multikultural, pembacaan ulang terhadap gagasan-gagasan KHD menjadi sangat penting untuk menjaga relevansi dan adaptabilitas pendidikan. KHD mengajarkan bahwa pendidikan adalah alat

perjuangan kebudayaan, dan budaya itu sendiri bersifat dinamis. Maka, pendidikan tidak boleh terjebak pada dogmatisme, termasuk terhadap pemikiran KHD itu sendiri. Justru dengan membuka ruang tafsir baru, pendidikan bisa terus beradaptasi dan merespons tantangan zaman, termasuk tantangan epistemologis yang ditawarkan postmodernisme (Setiawan, 2023).

Akhirnya, pembongkaran epistemologi pendidikan KHD dalam terang postmodernisme bukan bertujuan untuk melemahkan posisinya dalam pendidikan nasional, tetapi justru untuk memperkaya pemahamannya dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini menawarkan jalan tengah antara penghormatan terhadap warisan pemikiran KHD dan keterbukaan terhadap kritik filosofis yang produktif. Dalam dunia yang terus berubah, pendidikan perlu bersifat reflektif dan adaptif, serta bersedia menggugat fondasi-fondasi epistemologisnya demi menemukan bentuk-bentuk baru pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan relevan (Yuliana, 2024).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan dua strategi utama, yaitu genealogis dan dekonstruktif. Genealogi digunakan untuk melacak asal-usul dan transformasi makna atas konsep-konsep kunci dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD), seperti (kodrat alam) dan (kebudayaan), yang kemudian dibandingkan dengan perkembangan wacana filsafat pendidikan kontemporer. Dekonstruksi digunakan untuk menelaah teks-teks utama KHD, terutama dalam karya (Pendidikan), serta membandingkannya dengan (*The Postmodern Condition*) karya Jean-François Lyotard. Tujuannya adalah untuk membuka ruang-ruang ketegangan dan kemungkinan reinterpretasi pemikiran KHD dalam cahaya kritik postmodern terhadap totalitas dan otoritas epistemik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas teks primer karya KHD (khususnya *Dasar-dasar Pendidikan, Bagian Pertama*), dokumen kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka tahun 2022, serta karya filsuf postmodern seperti Lyotard, Foucault, dan Derrida. Teknik analisis yang digunakan adalah pembacaan ganda (*double reading*), yang memungkinkan konfrontasi antara teks pendidikan KHD dengan narasi postmodern. Selain itu, dilakukan analisis wacana kritis

terhadap penggunaan konsep kebudayaan dalam kerangka epistemologi pendidikan nasional yang bersinggungan dengan kritik postmodern terhadap universalisme, representasi tunggal, dan otoritas naratif.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah titik temu antara pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD) dan paradigma postmodern, terutama dalam hal penolakan terhadap model pendidikan yang mekanistik dan sentralistik. Baik KHD maupun pemikir postmodern seperti Lyotard dan Foucault menolak hegemoni sistem pendidikan yang seragam, teknokratis, dan menindas keberagaman peserta didik. Keduanya menawarkan kritik terhadap sistem kurikulum yang terlalu sentral, serta mendorong bentuk pendidikan yang lebih kontekstual dan berpihak pada keberagaman pengalaman manusia.

Namun, penelitian ini juga mengungkap ketegangan epistemologis yang signifikan. KHD memandang pengetahuan sebagai sarana penyadaran diri dan pembebasan, sedangkan dalam pandangan postmodern, pengetahuan adalah konstruksi yang selalu terkait dengan kekuasaan dan narasi dominan. Pandangan KHD tentang kebudayaan cenderung esensialis dan mengakar pada nilai-nilai universal bangsa, sedangkan pendekatan postmodern menekankan pluralitas dan dekonstruksi makna budaya. Selain itu, sistem among yang digagas KHD, yang menekankan peran pamong sebagai pembimbing yang egaliter, berhadapan dengan skeptisisme postmodern terhadap figur otoritatif apa pun, termasuk dalam praktik pendidikan.

Pembahasan

Refleksi Teoretis

Temuan penelitian ini membuka peluang untuk merumuskan sebuah sintesis antara epistemologi pendidikan lokal yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara (KHD) dengan kerangka pluralisme dalam filsafat postmodern. Di satu sisi, pemikiran KHD mewakili semangat pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan Nusantara dengan pendekatan etik yang memuliakan kemanusiaan. Di sisi lain,

pemikiran postmodern menawarkan kerangka kritik yang tajam terhadap klaim-klaim universal dalam pendidikan modern yang kerap mengabaikan konteks dan keberagaman lokal. Dalam ketegangan ini, terbuka ruang dialog konseptual untuk membangun kerangka pendidikan yang bersifat terbuka namun tetap berpijak pada akar historis dan kultural bangsa (Kurniasari, 2021).

KHD melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan diri yang merdeka lahir dan batin, yang berarti bahwa pendidikan harus membebaskan dan membentuk manusia utuh. Konsep ini beresonansi dengan semangat post-strukturalisme dalam filsafat postmodern yang menolak dominasi narasi tunggal dan membuka ruang bagi multiperspektivitas. Namun, pendekatan KHD tetap berakar pada pandangan tentang kebenaran budaya yang inheren dan tetap, sedangkan postmodern justru menolak fondasi tetap atas kebenaran apa pun. Kontras ini justru dapat dimaknai sebagai peluang, bukan pertentangan, yaitu dengan membentuk sintesis epistemik yang menghargai nilai lokal tanpa terjebak dalam romantisme esensialis (Arifin, 2020).

Implikasi lebih lanjut dari refleksi ini adalah perlunya membaca ulang proyek pendidikan nasional Indonesia yang selama ini cenderung menempatkan KHD dalam posisi mitologis. KHD sering kali dijadikan ikon simbolik tanpa keterlibatan kritis terhadap kompleksitas gagasannya, khususnya ketika dihadapkan pada dinamika global dan tantangan pemikiran kontemporer. Dalam konteks ini, pembacaan KHD secara dialogis dengan filsafat postmodern tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran pendidikan Indonesia, tetapi juga menjadi jalan untuk menghindari jebakan glorifikasi terhadap masa lalu yang ahistoris (Nurhadi, 2023).

Selain itu, pendekatan dekonstruktif terhadap teks KHD memberi peluang untuk melihat kembali ambivalensi konsep-konsep seperti *pamong*, *among*, dan kebudayaan. Misalnya, sistem *among* yang tampak egaliter dan humanistik tetap mengasumsikan figur *pamong* sebagai pusat moralitas, yang justru problematik dalam kerangka postmodern yang mengkritisi semua bentuk otoritas pendidikan. Kritik ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat membebaskan dalam tataran retorik, melainkan juga dalam praktik institusionalnya (Syahrul & Latif, 2022).

Dengan demikian, refleksi teoretis ini mengajukan pentingnya proyek pendidikan pasca-nasional: pendidikan yang tidak hanya mengakar secara historis tetapi juga responsif terhadap pluralitas epistemik dan dinamika global. Jalan tengah antara warisan pemikiran lokal seperti KHD dan wacana filsafat kontemporer adalah dengan terus menerus membuka ruang kritik dan reinterpretasi terhadap gagasan yang dianggap mapan. Ini adalah bentuk pendidikan yang progresif sekaligus kontekstual.

Transformasi Sistem Among dalam Lanskap Pendidikan Digital

Dalam konteks perkembangan teknologi digital yang pesat, sistem among yang diperkenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara (KHD) menghadapi tantangan baru. Sistem among yang menekankan pada prinsip kebebasan, pendampingan, dan keteladanan, kini bersaing dengan otoritas algoritmik yang mengarahkan proses belajar secara otomatis melalui logika kecerdasan buatan. Algoritma dalam platform digital seperti YouTube, Google, atau bahkan sistem e-learning formal, telah membentuk preferensi belajar mahasiswa tanpa keterlibatan langsung dari pamong sebagai figur pembimbing. Dalam hal ini, terjadi ketegangan antara otonomi pembelajar yang diidealkan oleh sistem among dengan otonomi semu yang dikendalikan oleh sistem digital (Yuliani, 2021).

Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dalam ranah pendidikan. Pengetahuan tidak lagi dibangun secara dialogis antara pamong dan siswa, melainkan melalui konsumsi data dan konten yang dipersonalisasi. Meskipun sistem among masih relevan secara filosofis dalam mengembangkan kemandirian belajar, penerapannya harus disesuaikan dengan realitas digital. Sebagai contoh, figur pamong bisa dikonstruksikan ulang dalam bentuk fasilitator digital atau mentor virtual yang tidak memaksakan otoritas tunggal, namun mampu membimbing dalam lanskap pengetahuan yang cair (Sasmita & Permana, 2022).

Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia dapat dilihat sebagai respons terhadap krisis epistemik dan otoritas dalam pendidikan kontemporer. Merdeka Belajar berupaya merehabilitasi semangat among dengan memberi ruang bagi siswa dan guru untuk menentukan jalur belajar sesuai konteks dan potensi masing-masing. Namun demikian, sebagaimana

dikritik oleh banyak kalangan, inisiatif ini rentan direduksi menjadi sekadar kebijakan teknokratis tanpa transformasi mendalam dalam paradigma pendidikan (Ritonga et al., 2023). Dalam konteks ini, penting untuk tidak hanya meniru sistem among dalam bentuknya yang simbolik, tetapi menggali kembali spirit pembebasannya secara substansial.

Lebih jauh, pluralitas pengetahuan yang diakui oleh pendekatan postmodern dapat memperkuat sistem among dalam membangun pendidikan yang tidak hegemonik. Artinya, pamong masa kini tidak hanya mentransfer nilai-nilai budaya nasional yang tunggal, tetapi menjadi fasilitator dialog antar wacana – termasuk wacana lokal, global, bahkan digital. Konsekuensinya, dibutuhkan kerangka epistemologis baru yang mampu menjembatani warisan pemikiran KHD dengan kondisi dunia belajar yang didominasi oleh jejaring, konten terbuka, dan disrupsi teknologi (Salim & Nugroho, 2020). Dengan demikian, transformasi sistem among bukanlah nostalgia terhadap masa lalu, tetapi upaya untuk merevitalisasi pendidikan sebagai ruang pembebasan yang adaptif terhadap zaman.

Refleksi Kritis terhadap Keterbatasan Studi

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan inheren dalam pendekatan filosofis yang menekankan pada analisis tekstual, khususnya saat mengkaji pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD) dalam lanskap kontemporer pendidikan. Salah satu batasan utama terletak pada potensi reduksi pemikiran KHD menjadi semata-mata artefak ideologis atau simbol nasionalisme yang dikomodifikasi oleh institusi pendidikan formal. Proses seleksi dan reproduksi konsep KHD dalam dokumen kurikulum, pelatihan guru, dan wacana publik sering kali mengabaikan kompleksitas gagasan asli beliau, terutama yang berkaitan dengan spiritualitas budaya dan otonomi pembelajaran. Dalam konteks ini, konsep sistem among yang egaliter dan berbasis nilai kearifan lokal mengalami penyempitan makna menjadi sekadar slogan administratif dalam manajemen sekolah (Zuhdi, 2019). Hal ini mengisyaratkan bahwa tanpa pendekatan kritis terhadap praktik-praktik representasi pemikiran KHD, terdapat risiko bahwa warisan intelektualnya justru kehilangan daya transformasinya.

Lebih jauh lagi, pendekatan genealogi dan dekonstruksi yang digunakan dalam studi ini tidak sepenuhnya mampu mengungkap implikasi sosiologis dari pemikiran KHD. Ketidakhadiran studi lapangan atau data empiris membatasi kemungkinan untuk memahami bagaimana ide-ide KHD diinternalisasi oleh guru, siswa, dan institusi pendidikan di era pasca-kebenaran. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa pemahaman konseptual terhadap teks tidak selalu sejalan dengan implementasi praksisnya, terutama dalam ruang kelas yang terjebak antara kebijakan neoliberal dan tuntutan digitalisasi pendidikan (Rahmawati & Siregar, 2023). Sebuah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis wacana, etnografi pendidikan, dan sosiologi pengetahuan akan memperkaya horizon pemaknaan terhadap pertemuan antara gagasan KHD dan epistemologi postmodern. Dalam hal ini, refleksi terhadap metodologi menjadi esensial agar kajian filosofis tidak terjebak dalam reproduksi narasi idealistik yang menjauh dari realitas empiris pendidikan saat ini.

Disadari pula bahwa keterbatasan lain dari penelitian ini adalah kemungkinan bias interpretatif dalam pembacaan teks KHD dan postmodernisme. Setiap dekonstruksi membawa serta horizon pemahaman tertentu yang dibentuk oleh latar ideologis dan kebudayaan peneliti. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka analisis reflektif yang secara sadar membuka ruang kritik terhadap interpretasi sendiri. Hal ini penting untuk menghindari pengultusan tokoh nasional seperti KHD atau romantisisme terhadap pemikiran pendidikan lokal sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap modernitas Barat (Syauky & Walidin, 2025). Dengan memperluas pendekatan kritis ini, diharapkan kajian semacam ini tidak hanya memperkuat posisi epistemologi lokal dalam percaturan wacana global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya desentralisasi pengetahuan dalam sistem pendidikan nasional yang inklusif dan pluralistik.

Kesimpulan

Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara (KHD) tetap relevan dalam menjawab krisis epistemologis yang mengemuka di era postmodern. Epistemologi yang dibangunnya, berlandaskan pada

asas humanisme kultural dan pembebasan, menjadi tawaran alternatif terhadap dehumanisasi pendidikan yang cenderung teknokratis dan transaksional. Trilogi pendidikan KHD *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* mengandung dimensi etis dan praksis yang mampu direvitalisasi sebagai paradigma pedagogi yang berpihak pada kemerdekaan dan martabat manusia. Dalam konteks ini, rekontekstualisasi gagasan KHD tidak hanya soal pelestarian nilai lokal, tetapi juga sebuah strategi kritis untuk menyikapi fragmentasi pengetahuan dan otoritas dalam dunia digital yang cair dan penuh disruptsi.

Rekomendasi yang dapat ditarik dari kajian ini adalah perlunya mengembangkan model pedagogi kritis berbasis lokal yang terbuka terhadap kompleksitas budaya kontemporer, termasuk tantangan pluralitas, relativitas makna, dan krisis identitas. Pedagogi semacam ini tidak berhenti pada pelestarian warisan KHD secara normatif, tetapi menempatkannya dalam dialektika baru antara tradisi dan perubahan. Di sisi lain, reformulasi kurikulum harus diarahkan untuk mengakomodasi relativitas pengetahuan tanpa kehilangan orientasi pada akar budaya bangsa, agar pendidikan tidak terjebak dalam arus global tanpa arah. Integrasi semacam ini menuntut keberanian epistemik untuk berdialog secara kritis dengan paradigma global sembari menjaga nalar keindonesiaan sebagai fondasi etik pembelajaran.

Referensi

- Arifin, Z. (2020). *Dekolonisasi Pengetahuan dan Pendidikan Kritis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(2), 112–128. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.36512>
- Hidayat, M. (2021). Reinterpretasi Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Perspektif Kritis. *Jurnal Filsafat Pendidikan Islam*, 5(2), 135–148. <https://doi.org/10.24042/fpi.v5i2.2749>
- Kurniasari, M. (2021). *Menggagas Pendidikan Multikultural Berbasis Lokalitas: Kritik Postmodern terhadap Wacana Kurikulum Nasional*.

Jurnal Pendidikan Multikultural, 9(1), 45–60.
<https://doi.org/10.23917/jpm.v9i1.41698>

Munir, A. (2021). Pendidikan sebagai Pembebasan: Kajian Filosofis atas Konsep Pamong dalam Pemikiran Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(3), 291–304.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v23i3.1345>

Nugraha, F. (2020). Humanisme Ki Hadjar Dewantara dalam Perspektif Kritik Postmodern. *Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 10(1), 55–66. <https://doi.org/10.20527/jpp.v10i1.8890>

Nurhadi, M. (2023). Kritik atas Narasi Heroik Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 12(3), 221–237. <https://doi.org/10.21580/jfi.2023.12.3.10945>

Rahmawati, D., & Siregar, R. (2023). Dekolonisasi Kurikulum dan Reaktualisasi Pendidikan Kritis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Pendidikan*, 21(2), 88–104.
<https://doi.org/10.21009/JFP.2023.21.2.6>

Rasidi, I. (2020). Dekonstruksi Pemikiran Pendidikan Nasional: Dari Kodrat Alam Menuju Konstruksionisme Sosial. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 11(1), 19–30.
<https://doi.org/10.21093/tj.v11i1.1660>

Ritonga, M., Ramadhan, F., & Handayani, E. (2023). Kebijakan Merdeka Belajar dan Transformasi Kurikulum: Kritik terhadap Implementasi dan Relevansi Filosofis. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 12–24.
<https://doi.org/10.24832/jipk.v10i1.3214>

Rohman, M. F. (2022). Fragmentasi Pengetahuan dan Tantangan Pendidikan Humanis di Era Postmodern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 101–117. <https://doi.org/10.21580/jpi.2022.8.1.9056>

Salim, H., & Nugroho, B. (2020). Re-thinking Educational Authority in the Age of Disruption: Local Wisdom and Postmodernism in

Indonesian Context. *International Journal of Educational Research Review*, 5(4), 457–468. <https://doi.org/10.24331/ijere.765450>

Sasmita, E., & Permana, R. (2022). Digital Pedagogy and Cultural Adaptation: Reconstructing the Role of Teachers in Online Learning. *Jurnal Pendidikan Islam Digital*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.23971/jpid.v4i2.2389>

Setiawan, D. (2023). Relevansi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Multikultural Kontemporer. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 21(2), 221–234. <https://doi.org/10.21043/dialogia.v21i2.14899>

Syahrul, I., & Latif, H. (2022). *Dekonstruksi Epistemologi Pendidikan: Membaca Sistem Among dalam Perspektif Poststrukturalisme*. *Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 18(1), 67–81. <https://doi.org/10.24042/jpp.v18i1.99327>

Syam, H. (2023). Kurikulum Merdeka dan Kritik terhadap Metanarasi Pendidikan Modern: Perspektif Postmodernisme. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 14(1), 75–89. <https://doi.org/10.32502/jkp.v14i1.9207>

Syauky, A., & Walidin, W. (2025). Relevansi Pemikiran Pendidikan Imam Ar-Rafi'ie dalam Konteks Pembelajaran Modern. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 1–19.

Wulandari, I., & Hartono, R. (2022). Kritis terhadap Narasi Pendidikan Nasional: Antara Romantisme Lokal dan Tantangan Global. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 211–225. <https://doi.org/10.21831/jpk.v27i3.2022>

Yuliana, D. (2024). Epistemologi Pendidikan di Era Disrupsi: Membaca Ulang Ki Hadjar Dewantara. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 45–60. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v19i1.11349>

Yuliani, R. (2021). Otoritas Algoritmik dan Krisis Pembelajaran Otonom: Tantangan Bagi Sistem Among di Era Digital. *Jurnal*

Filsafat dan Pendidikan, 8(3), 150–168.
<https://doi.org/10.22219/jfp.v8i3.2257>

Zuhdi, M. (2019). Pendidikan dan Konstruksi Budaya dalam Pemikiran Ki Hadjar Dewantara. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 6(1), 45–61.
<https://doi.org/10.15408/tjems.v6i1.11422>